

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2006. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bernhard Limbong. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Margaretha Pustaka. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta.
- Candra Irawan. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Donna Okthalia Setiabudhi dan Toar Neman Palilingan. 2015. *Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Prosedur dan Permasalahannya*. Makassar: Wiguna Media.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Tatanusa. Jakarta.
- John Salindeho. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Paertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta, hlm.73.
- Maria S.W. Sumardjono. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Muwahid. 2020. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Duta Media Publishing. Jawa Timur.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima.
- Rachmadi Usman. 2002. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1999. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni, Bandung.
- R Yando Zakaria. 2018. *Etnografi Tanah Adat*. Bandung: Agrarian Resources Center.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Rajawali Pers. Depok.

- Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. 2019. *Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Jawa Barat)*. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Yogyakarta.
- Sugianto dan Leliya. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis Dalam Presfektip Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Deepublish. Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasfat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.
- Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Umar Said Sugiharto, Suratman, Drs. Noorhudha, 2015, *HukumPengadaan Tanah*, cetakan kedua Setara Press; Malang.
- Urip Santoso. 2018. *Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Revka Petra Media. Surabaya.
- Urip Santoso. 2020. *Hukum Agraria dan Perkembangannya (Perspektif Politik Hukum)*. Prenadamedia, Surabaya.
- Yul Ernis. 2015. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1086 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2072 K/30/MEM/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1086 K/30/MEM/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan

Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4112 K/30/MEM/2014 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.k/30/mem/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Liki Pinangawan Muaraleboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011–2031;

Keputusan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/02/DESDM/BUP-2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi Di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Liki Pinangawan Muaralaboh Kepada PT. Supreme Energy Muara Laboh;

Keputusan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540-94-2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/02/DESDM/BUP-2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi Di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Liki Pinangawan Muaralaboh Kepada PT. Supreme Energy Muara Laboh.

Jurnal/ Publikasi/Skripsi/Artikel

Dindin Syarief Nurwahyudin, dan Udi Harmoko, 2020. "Pemanfaatan dan Arah Kebijakan Perencanaan Energi Panas Bumi di Indonesia Sebagai Keberlanjutan Maksimalisasi Energi Baru Terbarukan." *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 1.3: 111-123.

Diska Resha Putra, Donny Yoesgiantoro, dan Suyono Thamrin. 2020. "Kebijakan Ketahanan Energi Berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.3 : 658-672.

Supreme Energy. 2015. *Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup–Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat*. Jakarta.

Dwi Nurul Aulia Pattiha, Jemmy Jefry Pietersz, dan Novyta Uktolseja. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *PATTIMURA Law Study Review* 1.1: 14-21.

Edi Rohaedi, Isep H. Insan, dan Nadia Zumaro. 2019. "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *PALAR (Pakuan Law review)* 5.2.

Edy Lisdiyono, 2016. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Implikasinya dengan Alih Fungsi Lahan dan Penataan Ruang." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9.1.

Faisal. 2021. "Urgensi pengaturan pengembangan energi terbarukan sebagai wujud mendukung ketahanan energi nasional." *Ensiklopedia Social Review* 3, No. 1.

- Faradina Arlan. 2023. Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi Universitas Andalas.
- Fikri Amarrilo Adiprana. 2022. Kajian Tata Kelola Lingkungan Multi Level Pada Program Pemulihan Mata Pencarian Masyarakat Terdampak Akuisisi Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Labuh Solok Selatan. Tesis. Institut Teknologi Bandung.
- Hardianto Djanggih, dan Salle. 2017. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Pandecta Research Law Journal* 12.2: 165-172.
- Kasbani. 2009. "Tipe Sistem Panas Bumi Di Indonesia Dan Estimasi Potensi Energinya." *Buletin Sumber Daya Geologi*, 2009, 4.3: 23-30.
- Muhammad Insa Ansari. 2017. "BUMN dan penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan." *Jurnal Konstitusi* 14.1 : 104-123.
- Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana. 2020. "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)," *Diponegoro Law Journal* 9.1 : 138-154.
- Mukmin Zakie. 2011. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia)." *Jurnal Hukum* 18 (2011): 204.
- Putri Lestari. 2020. "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila." *SIGN Jurnal Hukum* 1.2 : 71-86.
- Rini Mulyanti. 2013. "Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2). Tesis Megister Universitas Indonesia.
- Supriyono. 2012. "Kajian atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik PLTA Upper Cisokan Pump Storage 1040 MW." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1.2.
- Titin Fatimah, dan Hengki Andora. 2010. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)." *Jurnal Ilmu Hukum* 5.1: 11-28.
- Urip Santoso. 2016. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif* 21.3: 188-198.
- Wahyu Setyaningsing. 2011. "Potensi lapangan Panasbumi Gedongsongo sebagai sumber energi alternatif dan penunjang perekonomian daerah." *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian* 8.1 (2011): 11-20.
- Yusuf Rachmat Arifin. 2020. "Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6.1 : 1-31.

Internet

- Ahmad Wijaya. "Sumatera Barat miliki potensi panas bumi hingga 230 Mega Watt." <https://www.antaraneews.com/berita/3782334/sumatera-barat-miliki-potensi-panas-bumi-hingga-230-mega-watt#:~:text=%22Di%20Solok%20Selatan%20kita%20punya,Herry%20Martinus%20di%20Padang%2C%20Kamis>. dikunjungi pada 5 Januari 2024 Jam 22.14 WIB.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Potensi Panas Bumi di Sumbar Harus Dimanfaatkan," <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/486>. dikunjungi pada 7 Januari 2024 Jam 06.47 WIB.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. "*PT Supreme Energy Muara Laboh.*" <https://sumbarprov.go.id/home/news/2824-pt-supreme-energy-muara-laboh>, dikunjungi pada tanggal 04 Desember 2023 Jam 23.33.
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. "*Kembangkan Panas Bumi, Pemerintah Terus Lakukan Berbagai Terobosan.*" <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/09/21/2626/kembangkan.panas.bumi.pemerintah.terus.lakukan.berbagai.terobosan>. dikunjungi pada 20 Desember 2023 Jam 16.43 WIB.
- Humas EBTKE. "*PLTP Muara Laboh Tahap Satu Beroperasi, Suplai Listrik Sumatera Barat Makin Andal.*" <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/18/2431/pltp.muara.laboh.tahap.satu.beroperasi.suplai.listrik.sumatera.barat.makin.andal>. dikunjungi pada 21 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.
- Power Technology. "*Muara Laboh Geothermal Power Plant, West Sumatera.*" <https://www.power-technology.com/projects/muara-laboh-geothermal-power-plant-west-sumatera/?cf-view>. diakses pada 22 November 2023.

